

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azwar, Saifuddin 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Brotodihardjo, Santoso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung
- Fajar, Mukti dan Yulianti Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hamid, Hamrat dan Haru M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Graika, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet, 2013, *Pengantar Ilmu Pajak (Kebijakan dan Implementasi di Indonesia)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- S. Suriasumantri, Jujur, 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentan Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta
- Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Cetakan I, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT Refika Aditama, Bandung
- Soekanto, Soerjono 2015 , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normati: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik, 2018, *Statistik Indonesia 2018*, CV. Dharmaputra, Jakarta
- Surono, 2013, *Bahan Ajar Pengantar Cukai*, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jawa Barat

B. Artikel Jurnal

Romeo Manurung, 2017, Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor .1923/Pid.Sus/2014/PN-Lbp), *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Marcella Taweru, 2016, Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung), *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung

Iham Dwi Maryadi, 2016, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)", *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

D. Internet

Benedikta Desideria, 2014, "Kenapa Minuman Beralkohol Bikin Kecanduan?", <https://www.liputan6.com/health/read/2076066/kenapa-minuman-beralkohol-bikin-kecanduan>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2018

Elviana Roza, 2017, "Maritim Indonesia, Kemewahan Yang Luar Biasa", <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018

Gerry Abrian, 2016, "Memahami Posisi Indonesia Pada Jalur Perdagangan Internasional", <https://newswantara.com/maritim/memahami-posisi-indonesia-pada-jalur-perdagangan-internasional>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018

Ilyas Istianur Praditya, 2018, "Menhub: 40 Persen Perdagangan Dunia Lewat Indonesia", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3338504/menhub-40-persen-perdagangan-dunia-lewat-indonesia>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018

Mehulika Sitepu, "Regulasi 'sudah ketat', mengapa miras oplosan terus saja memakan korban?", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43715119>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2018

_____, 2016, “Ingat”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peringatan>, diakses pada tanggal 9 Januari 2019 pukul 21.45 WIB

_____, 2011, “Tugas Pokok dan Fungsi”, <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 3.25 WIB

_____, 2017, “Bea Cukai Tindak 9 Ribu Kasus Sepanjang 2017”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/04/bea-cukai-tindak-9-ribu-kasus-sepanjang-2017>, diakses pada tanggal 30 September 2018 Pukul 21.12 WIB

_____, 2018, “Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5116a70500028/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns>, diakses pada tanggal 30 September 2018 Pukul 21.09 WIB

E. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 tentang Tata acara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 145/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyidikan